

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2011 dunia dikejutkan dengan revolusi di Timur Tengah. Diawali oleh revolusi Tunisia, Mesir dan Libya. Revolusi terus menyebar ke Negara-negara di sekitar tiga Negara tersebut, Arab Saudi, Bahrain, Qatar dan yang menjadi sorotan secara khusus oleh PBB adalah konflik yang terjadi di Suriah. Bahkan bukan hanya PBB, Liga Arab yang menjadi tempat bernaung Suriah menjadi galak menghadapi eskalasi konflik Negara tersebut. Dalam menghentikan konflik di Suriah, PBB telah melakukan berbagai bentuk tekanan kepada Suriah di antaranya dengan mengeluarkan resolusi.¹ Sebagai lembaga internasional, tekanan PBB sebenarnya telah dirasakan oleh Suriah.

Upaya-upaya yang dilakukan PBB terbukti tidak berhasil dalam menghentikan kekerasan di Suriah, bahkan hingga hari ini kekerasan di Suriah terus terjadi. Walaupun berbagai misi yang diprakarsai oleh PBB maupun lembaga-lembaga regional sudah dilakukan. Misi terakhir misalnya mengirim

¹ Rusia dan china resolusi suriah. Diunduh dari <http://www.guardian.co.uk/world/2011/oct/05/russia-china-veto-syria-resolution>. Diakses 1 April 2012

mediator mantan Sekjen PBB Kofi Annan untuk menghentikan kekerasan di Suriah.

Konflik Suriah telah menyita publik internasional; PBB, AS, dan Liga Arab, Uni Eropa juga telah memberikan perhatian serta berbagai macam tekanan berupa terhadap pemerintah Suriah untuk menghentikan kekerasan yang terjadi. Dalam berbagai kesempatan dan pertemuan, Uni Eropa terus mendesak Suriah agar mengakhiri kekerasan terhadap oposisi.

Pada bulan September 2011 Uni Eropa meningkatkan sanksi terhadap Suriah, dengan melarang impor minyak dari negara itu. Departemen Luar Negeri Inggris mengatakan pejabat Uni Eropa sepakat untuk melarang impor minyak Suriah ke Uni Eropa. Langkah tersebut untuk meningkatkan tekanan terhadap rezim Suriah terkait dengan operasi yang dilakukan terhadap unjuk rasa anti-pemerintah. Dalam pernyataannya, Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski menuduh Presiden Assad telah melakukan pembantaian di negaranya sendiri.

Dalam suatu pertemuan di Brussel, 27 anggota Uni Eropa membuat pernyataan bersama mengenai konflik di Suriah. Dalam pernyataan bersama yang dibacakan pasca pertemuan tersebut, Presiden Eropa Herman van Rompuy mengatakan bahwa Uni Eropa sangat mencemaskan tindak kekerasan yang terus berlangsung terjadi di Suriah. Lebih lanjut dikatakan Herman bahwa Uni Eropa

akan terus memperketat sikap terhadap Suriah selama rejim yang berkuasa terus melanggar hak azasi manusia.² Ia juga mendesak pertanggungjawaban dari pelaku-pelaku kekerasan yang terlibat di Negara tersebut. Pernyataan tersebut mengarah pada pemerintah Suriah.

Langkah Uni Eropa untuk menekan rezim Damaskus terus dilakukan, di antaranya yaitu dengan memberikan sanksi kepada orang dekat Assad untuk tidak diberi izin bepergian ke Eropa.³ Pengumuman pertama pelarangan bepergian untuk orang dekat dan keluarga Assad dilakukan pada bulan September. Uni Eropa secara resmi mengumumkan sejumlah daftar nama pejabat Suriah dan tiga kelompok Suriah ke dalam daftar pihak-pihak yang akan dilarang mengunjungi Uni Eropa dan mengalami pembekuan aset.⁴

Kemudian pada bulan Maret 2012, Uni Eropa dalam pertemuan menteri-menteri luar negeri Uni Eropa di Brussel melahirkan kesepakatan. Dalam pertemuan tersebut disepakati sanksi-sanksi baru terhadap ibu negara Suriah, Asma al-Assad, ibu presiden dan saudara perempuannya, serta delapan pejabat pemerintah. Seluruh aset keluarga Asma dibekukan.⁵ Sanksi tersebut mulai

² UE desak suriah akhiri kekerasan. Diunduh dari <http://www.tribunnews.com/2012/03/03/ue-desak-suriah-akhiri-kekerasan>. Di akses tanggal 1 April 2012.

³ UE tetapkan sanksi terhadap kalangan dekat presiden Assad. Diunduh dari <http://www.voaindonesian.com/content/uni-eropa-tetapkan-sanksi-terhadap-kalangan-dekat-presiden-assad-144077786/109301.html>. Di akses pada tanggal 1 April 2012.

⁴ Uni Eropa boikot minyak suriah. Diunduh dari <http://www.tribunnews.com/2011/09/02/uni-eropa-boikot-minyak-suriah>. Di akses 1 April 2012.

⁵ Tekanan menguat, Assad tak henti serang oposisi. Di unduh dari <http://m.jpnn.com/news.php?id=122038>, Tekanan Menguat, Assad Tak Henti Serang Oposisi: Setelah Uni Eropa Cekal dan Bekukan Aset Istrinya. Di akses pada tanggal 1 April 2012.

berlaku Sabtu 24 Maret 2012 hingga waktu yang belum ditentukan. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton mengatakan Eropa sangat prihatin atas krisis Suriah dan bahwa sanksi merupakan alat penting dalam menangani situasi tersebut.

Sanksi tersebut ditetapkan di tengah laporan tentang bocoran email yang mengatakan istri Assad yang lahir di Inggris itu melanjutkan belanja barang-barang mewah di wilayah Eropa sementara Suriah berada pada situasi kekerasan. Di antara email yang bocor ke Daily Mail yang menjadi pertimbangan dari sanksi Uni Eropa yaitu email yang berisi klaim Asma al-Assad yang menyebut dirinya sebagai ‘diktator yang sesungguhnya. Email tersebut dikirim ke salah satu email kepada sahabatnya. Selain itu, Asma Assad juga mengirim email yang berisi sanjungan terhadap pidato suaminya soal kondisi di Suriah.⁶

Berbeda dengan sikap anggota Uni Eropa lainnya, Inggris memberikan keleluasaan kepada Asma Assad untuk mengunjungi Inggris, karena Asma Assad adalah warga Negara Inggris. Hal tersebut diungkapkan oleh Pejabat Inggris pasca pertemuan menteri luar negeri Uni Eropa. Dalam pernyataannya, pejabat itu mengatakan bahwa larangan perjalanan Uni Eropa tidak bisa

⁶ Istri assad di cekal Uni Eropa. Diunduh dari <http://www.pelitaonline.com/read-cetak/19887/istri-assad-dikenai-cekal-uni-eropa/>. Di akses 1 April 2012.

menghentikan ibu negara Suriah ke Inggris, jika dia tetap mempertahankan kewarganegaraannya.⁷

Di luar tekanan-tekanan yang diberikan oleh Uni Eropa seperti disebutkan di atas, Uni Eropa tetap menolak inisiatif Negara-negara regional untuk menggunakan kekuatan militer dalam mengubah sikap rezim Assad. Sejak awal Uni Eropa mengatakan tidak akan menggunakan cara-cara militer dalam menghentikan kekerasan di Suriah. Terakhir, pada Maret 2012, pasca penutupan pertemuan tidak resmi para menteri luar negeri Eropa Menlu Prancis Alain Juppe mengatakan penolakannya untuk menggunakan usaha-usaha solusi militer di Suriah.

Namun Uni Eropa mengutarakan kecemasannya terhadap perang saudara yang melibatkan pasukan pemerintah dan pemberontak, sekalipun mendapat dukungan dari Negara regional seperti Qatar terus menyerukan permintaannya kepada Negara-negara Barat untuk mengirim pasukan perdamaian Arab dan internasional ke Suriah. Sikap Uni Eropa untuk tidak menggunakan solusi militer juga diperkuat oleh pernyataan Ketua Kebijakan Luar Negeri EU Catherine

⁷ UE tetapkan sanksi. Di Unduh dari <http://www.voaindonesian.com/content/uni-eropa-tetapkan-sanksi-terhadap-kalangan-dekat-presiden-assad-144077786/109301.html>. Diakses 1 April 2012

Ashton. Dia mengatakan bahwa jalan yang akan tempuh dalam menyelesaikan permasalahan di Suriah adalah solusi politik.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengenaan sanksi pelarangan perjalanan ke wilayah Eropa terhadap kalangan dekat dan keluarga Presiden Suriah Bashar al-Assad oleh Uni Eropa dengan judul penelitian, “Sikap Uni Eropa Terhadap Suriah (Studi Kasus : Pelarangan Berpergian ke Eropa Terhadap Kalangan Dekat Keluarga Presiden Suriah Bashar Al-Assad)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan ditemukan jawabannya adalah: Mengapa Uni Eropa memberikan sanksi larangan berpergian kepada orang dekat Presiden Suriah Bashar Al-Assad ke wilayah Eropa?

C. Kerangka Teori

Dalam masalah ini, konsep yang digunakan adalah teori atau konsep kebijakan luar negeri dan aktor rasional.

⁸ UE: Tidak ada sanksi militer. Di unduh dari http://www.jurnas.com/news/54954/Uni_Eropa:_Tidak_Ada_Solusi_Militer_di_Suriah/1/Internasional/Timur_Tengah. Di akses tanggal 20 Maret 2011

1. Aktor Rasional

Dalam kajian teori/model aktor rasional, politik luar negeri dipandang sabagialah akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolitik, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu *proses intelektual*. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini individu itu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menerapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada.

Jadi, unit analisis pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu.⁹

Sementara itu, Menurut Graham T Allison,¹⁰ teori atau model aktor rasional ini mendasarkan pada gagasan adanya rasionalitas komprehensif dari perilaku ideal, artinya mencari pilihan alternatif yang paling ideal. Dengan kata lain memutuskan suatu kebijakan yang paling optimum dalam artian pada

⁹ Mohtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES, 1990, hal. 234

¹⁰ Graham T. Allison, *Essence of decision* (Little brow 71) “ conceptual model's and the Cuban missile crisis ”. *American political science review* (sept 69) dan Allison and Morton halperin, “ bureaucratic politics ”, a paradigm and some policy implication “, *world politics*, vol 24 19728

hubungan sarana dan tujuannya. Dalam model ini, yakni aktor rasional, dipandang sebagai akibat tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Proses pembuatan keputusan luar negeri digambarkan sebagai proses intelektual. Politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional.

Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang berakar dan terkoordinasi. Dalam model ini digambarkan bahwa pembuat keputusan dalam melakukan alternatif-alternatif itu menggunakan kriteria “optimalisasi hasil”. Para pembuat keputusan ini digambarkan selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaannya. Model ini sering diterapkan untuk mendeskripsikan politik luar negeri.

Unit analisis model pembuat keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung rugi atau masing-masing alternatif itu.

Graham T. Allison memberikan gambaran mengenai proses pembuatan keputusan politik luar negeri, antara lain : model aktor nasional, model proses organisasi, dan model politik birokratik. Dalam kasus ini, model pembuatan keputusan yang akan digunakan oleh penulis adalah model aktor rasional. Aktor rasional dipandang sebagai orang yang mengetahui tentang pilihan-pilihan yang

tersedia dan kosnukuensi-konsukuensi yang mungkin timbul dari setiap pilihan sebelum mengambil keputusan.

Pembuatan keputusan luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Dimana pemerintah dianalogikan sebagai perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Setiap individu melalui beberapa tahap intelektual menerapkan dan menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Maka unit analisis pada pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis tentang politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa itu sendiri.

Model ini sangat terkenal terutama karena asumsi rasionalitas yang dikandungnya. Dalam model ini para pembuat keputusan itu dianggap rasional, dan kita pada umumnya memang cenderung berpikir bahwa keputusan (terutama yang menyangkut politik luar negeri) di buat secara rasional. Karena itulah, menurut Allison, model ini paling sering diterapkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan politik luar negeri.

Dalam model aktor rasional, yang menjadi aktor dalam hubungan internasional adalah negara atau Organisasi Internasional Uni Eropa. Sementara yang dimaksud rasional adalah posisi atau keadaan yang dihadapi oleh Uni Eropa dalam menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah. Uni Eropa menuding Suriah telah melakukan kejahatan kemanusiaan yang mengakibatkan ribuan rakyatnya tewas.

Dalam persoalan hak asasi manusia, Uni Eropa yang merupakan sebuah organisasi antar pemerintah dan supra-nasional memberikan perhatian khusus kepada HAM sebagai nilai-nilai pokok bagi Uni Eropa. Uni Eropa berupaya untuk memastikan bahwa semua hak asasi manusia, baik hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya, dihormati di mana pun. sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan ditegaskan kembali dalam Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia tahun 1993. Uni Eropa juga mengedepankan hak-hak wanita, anak-anak, kaum minoritas, serta pengungsi.

Traktat Lisbon, yang menetapkan dasar hukum dan kelembagaan untuk Uni Eropa, mempertegas bahwa Uni Eropa berpedoman pada prinsip-prinsip berikut ini: demokrasi, supremasi hukum, kesemestaan dan keutuhan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, penghormatan pada martabat manusia, prinsip-prinsip kesetaraan dan solidaritas, dan penghormatan pada prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional. Prinsip-prinsip tersebut ditopang oleh [Piagam Uni Eropa tentang Hak-Hak Dasar, yang menuangkan seluruh hak-hak tersebut dalam satu naskah](#).

Walaupun untuk di wilayah Uni Eropa tercatat pelanggaran HAM tercatat sedikit, namun Uni Eropa belum puas. Uni Eropa berjuang melawan rasisme, xenophobia dan bentuk-bentuk lain dari diskriminasi berdasarkan agama, jenis kelamin, usia, kecacatan dan orientasi seksual.

Selain itu, kebijakan pelarangan berpergian kepada kalangan dekat pemimpin Suriah bertujuan untuk menekan Pemerintahan Bashar karena telah

melakukan berbagai hal yang dianggap tidak bertanggung jawab, dimana negaranya sedang mengalami konflik yang menelan ribuan nyawa, tetapi “Sang Ibu Negara Suriah” malah menyetujui sikap kediktatoran suaminya, dan juga ia beserta keluarganya malah sibuk dengan urusan berbelanja dan bisnis. Hal ini yang menjadikan pertimbangan bagi Uni Eropa untuk mengeluarkan kebijakan pelarangan tersebut. Langkah politis ini diharapkan, agar Asma beserta keluarganya sadar akan keadaan yang sedang terjadi pada negaranya dan posisi mereka sebagai kalangan dekat Presiden Bashar, dan kemudian mereka pada akhirnya mampu mengingatkan serta mendesak Bashar agar menghentikan kekerasan kepada rakyatnya.

Dalam kasus ini, alternatif pilihan yang dihadapkan Uni Eropa adalah mengambil keputusan memberikan sanksi kepada pemerintahan Bashar. Adapun keuntungan dan kerugian dari sikap Uni Eropa terhadap Suriah ini antara lain:

- a. Uni Eropa memberikan sanksi terhadap Suriah.

Keuntungan yang akan didapat Uni Eropa jika memberikan sanksi kepada Suriah adalah citra yang didapat dari keikutsertaannya sebagai salah satu organisasi yang ikut menciptakan perdamaian dan menegakan HAM di dunia. Uni Eropa memang sudah mengubah jati dirinya, bukan lagi sebagai organisasi yang berorientasi hanya pada masalah ekonomi, tetapi juga melebarkan visi pada masalah demokrasi dan HAM.

Sedangkan kerugian yang akan didapat Uni Eropa jika memberikan sanksi tersebut adalah berkurangnya pendapatan pajak dari pembiayaan jumlah belanja yang dilakukan oleh Asma Assad terhadap produk barang yang dibelinya.

b. Uni Eropa tidak memberikan sanksi terhadap Suriah.

Keuntungan yang akan diterima Uni Eropa apabila tidak memberikan sanksi terhadap Suriah adalah tidak adanya perubahan yang akan dialami Uni Eropa.

Sedangkan kerugian yang akan diterima apabila Uni Eropa tidak memberikan sikap terhadap Suriah adalah Uni Eropa akan kehilangan pengaruhnya terhadap peran pembela demokrasi dan HAM di dunia internasional.

Uni Eropa memandang bahwa langkah-langkahnya adalah pilihan yang paling ideal karena memang sudah sewajarnya pemimpin suatu negara itu akan lebih memikirkan perdamaian di negaranya sendiri, dibanding melakukan hal lainnya. Oleh sebab itu, ketika melihat keadaan yang dilakukan pemimpin Suriah tersebut, maka wajar apabila Uni Eropa memilih untuk memberikan tekanan dengan cara memberikan sanksi.

Berdasarkan gambaran sikap-sikap Uni Eropa dalam menghadapi konflik di Suriah, jelas bahwa sebagai suatu komunitas Negara-negara, Uni Eropa mempertimbangkan secara seksama langkah-langkah yang akan ditempuh agar

tidak merugikan pihaknya. Uni Eropa memahami resiko dari setiap langkah-langkah yang diambilnya.

2. Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri

Dalam skripsi ini juga akan digunakan teori pembuatan keputusan (Decision Making Theory) menurut David Easton. Easton dikenal sebagai teoritis politik pertama yang memperkenalkan pendekatan system dalam ilmu politik.¹¹ Pada dasarnya Easton menyatakan bahwa sistem politik adalah alokasi nilai-nilai dimana pengalokasian dari nilai-nilai tersebut bersifat paksaan atau dengan kewenangan, dan pengalokasian yang bersifat paksaan tadi mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan.¹² Yang dimaksud dengan sistem adalah hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur atau suatu keseluruhan yang tersusun dari banyak kegiatan.¹³ Menurut pendekatan ini, setiap sistem tentu memiliki sifat (1) terdiri banyak kegiatan; (2) bagian-bagian itu saling berinteraksi dan saling tergantung; (3) system itu mempunyai perbatasan (*boundaries*) yang memisahkan dari lingkungannya yang juga terdiri dari system-sistem lain.¹⁴ Dan berdasar definisi Easton tentang politik, sistem politik adalah bagian dari sistem sosial yang menjalankan (a) alokasi nilai-nilai (dalam bentuk keputusan-keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan), yang (b) alokasinya bersifat otoritatif (yaitu dikuatkan oleh

¹¹ Moctar Mas' oed dan colin MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta: Gajah Mada University Press : 1987, p. xii.

¹² Haryanto, Sistem Politik Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, Oktober 1982.

¹³ Amirin, Tatang M, Pokok-pokok Teori Sistem, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

¹⁴ Moctar Mas' oed dan Colin MacAndrews, loc.cit.

kekuasaan yang sah) dan (c) alokasi yang bersifat otoritatif itu mengikat seluruh masyarakat. Dalam masyarakat modern, otorita atau kekuasaan yang sah, yang memiliki wewenang sah untuk menggunakan kekuasaan dan paksaan berbentuk negara.¹⁵

Terdapat dua jenis input di dalam sistem politik, yaitu input yang berupa tuntutan dan input yang berupa dukungan. Kedua jenis input inilah yang akan memberikan bahan mentah yang harus diproses di dalam sistem politik, dan juga merupakan energi atau bahan bakar yang dibutuhkan untuk kelangsungan sistem politik. Tanpa adanya kedua jenis input ini, maka sistem politik tidak akan menjalankan fungsinya. Kedua jenis input ini yaitu tuntutan dan dukungan berasal dari lingkungan sistem politik, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal.¹⁶

Input: Tuntutan. Input yang berupa tuntutan ini dapat berasal dari lingkungan yang berada di sekitar system politik, maupun yang berasal dalam system politik itu sendiri. Input yang berasal dari lingkungan di sekitar system politik dapat kita sebut dengan tuntutan eksternal, dan input yang berasal dari dalam system politik itu sendiri dapat kita sebut sebagai tuntutan internal.¹⁷

Untuk memberikan penjelasan mengenai tuntutan yang berasal dari lingkungan sistem politik atau tuntutan eksternal, maka kita memandang

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Haryanto, Sistem Politik : Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1982. Hal 28-29.

¹⁷ Ibid. hal. 29

lingkungan sebagai sistem-sistem yang mudah dapat kita bedakan satu dengan lainnya. Dalam hal ini lingkungan bukan kita pandang sebagai kumpulan peristiwa yang campur baur. Di dalam lingkungan terdapat berbagai macam sistem yang kita temukan, seperti sistem ekologi, sistem ekonomi, sistem kebudayaan, sistem demografi, sistem religi, dan lain-lainnya. Sistem-sistem yang terdapat di dalam lingkungan tersebut dapat kita bedakan dengan system politik. Sistem-sistem yang terdapat di dalam lingkungan tersebut pada gilirannya akan melahirkan serangkaian variabel yang mempengaruhi pembentukan tuntutan-tuntutan yang masuk ke dalam sistem politik.¹⁸ Sedangkan untuk menjalankan input yang berasal dari dalam sistem politik atau tuntutan internal, maka kita mengetahui bahwa di dalam proses sistem politik dapat muncul tuntutan-tuntutan yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan hubungan-hubungan politik diantara anggota-anggota sistem politik itu sendiri sebagai akibat dari rasa ketidakpuasan atas hubungan-hubungan.¹⁹

Kedua jenis tuntutan ini, yakni tuntutan eksternal dan internal, perlu kita bedakan dalam mengamati proses berlangsungnya sistem politik. Hal ini dikarenakan tuntutan internal bukanlah merupakan input yang dimasukkan ke dalam sistem politik, akan tetapi merupakan input yang dimasukkan ke dalam sistem politik, akan tetapi merupakan sesuatu yang timbul di dalam politik itu sendiri. Dan oleh itu karena itu pula konsukuensi-konsukuensi yang ditimbulkan

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

oleh tuntutan yang berasal dari luar atau lingkungan di sekitar sistem (tuntutan eksternal). Jadi dalam hal ini kita harus benar-benar menyadari bahwa tuntutan yang masuk ke dalam sistem politik sebagai input dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tuntutan eksternal dan internal.²⁰

Input: dukungan. Selain input yang berupa tuntutan, maka demi kelangsungan kerja suatu sistem politik diperlukan adanya jenis input yang lainnya. Input yang lain ini kita kenal dengan dukungan.²¹ Agar tetap dapat menjaga berlangsungnya kegiatan atau aktifitas sistem politik, maka sistem politik memerlukannya adanya energi atau bahan bakar. Energi atau bahan bakar tersebut dapat mengambil bentuk tindakan-tindakan atau pandangan-pandangan yang dapat memajukan atau sebaliknya dapat merintangki kegiatan atau aktifitas suatu sistem politik. Input atau masukan yang semacam ini disebut dukungan. Dengan tidak adanya dukungan, maka tuntutan-tuntutan yang diajukan tidak akan dapat dipenuhi atau konflik-konflik yang muncul mengenai tujuan tidak dapat terselesaikan. Apabila suatu tuntutan dikehendaki supaya digarap dan dapat masuk ke dalam tingkat pembuatan keputusan, maka anggota-anggota dari sistem politik yang mencetuskan tuntutan itu harus mengusahakannya agar dapat menjadi suatu keputusan yang mengikat dan anggota-anggotanya yang berusaha

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid hal. 31

mempengaruhi proses-proses tersebut bagaimanapun juga harus memperoleh dukungan dari pihak-pihak yang lainnya di dalam sistem politik tersebut.²²

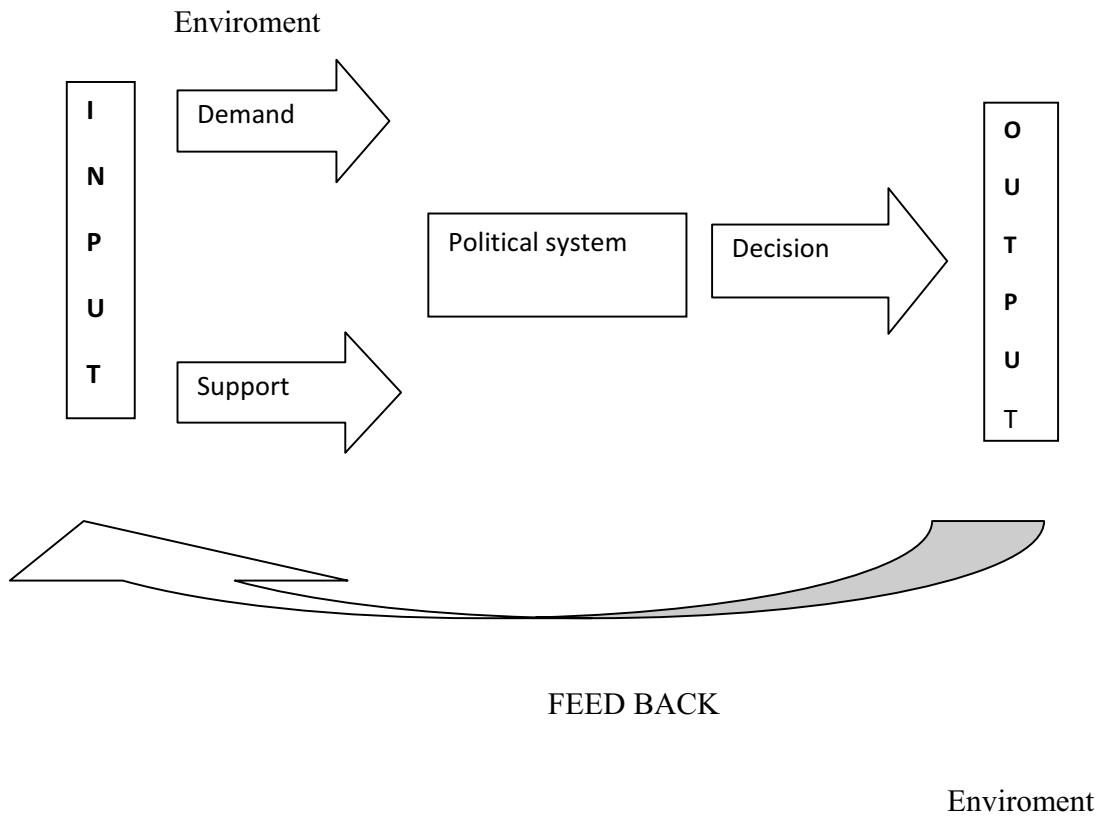
Dalam membahas tentang input yang berwujud dukungan ini, maka kita perlu untuk mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan dukungan itu sendiri. Dukungan atau sikap memberikan dukungan adalah apabila seseorang bertindak demi atau bersikap menyetujui tindakan-tindakan, kepentingan-kepentingan maupun tujuan-tujuan pihak atau orang lain. Oleh karena itu tindakan atau tingkah laku dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, yaitu bentuk tindakan yang mendukung yang nyata dan terbuka; dan yang kedua, yaitu bentuk tindakan atau tingkah laku mendukung yang tidak berwujud nyata dari luar (dari luar tindakan atau tingkah laku mendukung tersebut tidak nyata) yang disebut dengan pandangan atau suasana pemikiran.²³

Gambar 1.1

²² Ibid. hal 30.

²³ Ibid.

Proses Pembuatan Kebijakan Menurut David Easton



Sumber : Haryanto, “ Sistem Politik : suatu Pengantar”, Yogyakarta : Liberty, 1982, hal.

9.

Bagan di atas merupakan bagan proses pembuatan keputusan menurut David Easton. Secara keseluruhan proses pembuatan keputusan tersebut merupakan satu kesatuan sistem dimana di dalam keseluruhan sistem pembuatan keputusan tersebut terdiri dari sekian banyak bagian. Dalam bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam proses pembuatan keputusan terdapat elemen yang mempengaruhi jalannya proses pembuatan keputusan tersebut. Elemen-elemen

dalam proses pembuatan keputusan tersebut terdiri dari input dimana input ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dukungan internal dan tuntutan eksternal yang merupakan energi atau bahan bakar dari proses pembuatan keputusan tersebut. Adanya input yang terdiri dari dukungan (*support*) dan tuntutan (*demands*) menyebabkan aktor politik dalam sebuah negara atau suatu organisasi internasional membuat dan mengambil suatu kebijakan baik kebijakan domestik maupun kebijakan luar negeri.

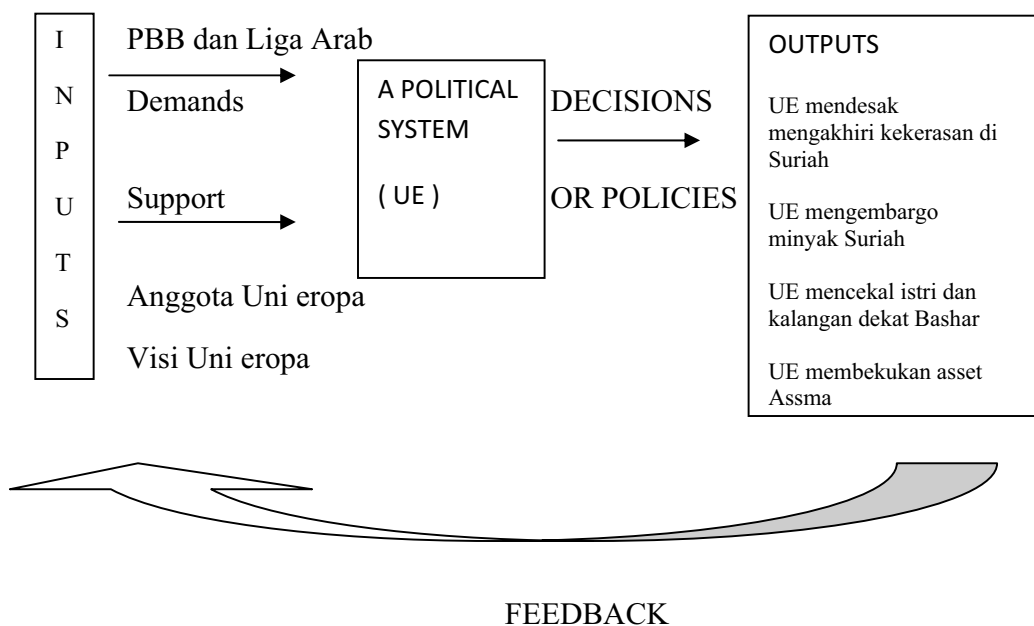
Selain input yang berupa dukungan internal dan tuntutan eksternal, terdapat juga sistem politik dimana sistem politik ini merupakan tempat diprosesnya input yang masuk untuk menjadi sebuah kebijakan. Di dalam sistem politik, terdapat sebuah fungsi yang sangat penting untuk mengubah atau mengkonversikan tuntutan-tuntutan dan dukungan sampai menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan umum sebelum tuntutan dan dukungan tersebut menjadi sebuah kebijakan, fungsi ini disebut dengan fungsi agregasi kepentingan. Pada setiap organisasi internasional atau negara, prosedur dalam memproses input menjadi sebuah kebijakan tergantung dari birokrasi yang berlaku di dalam organisasi internasional atau negara tersebut. Elemen selanjutnya dari sistem tersebut adalah output yang berupa kebijakan. Berdasarkan bagan di atas, output yang dihasilkan dari sebuah sistem politik dapat menjadi *feedback* atau umpan balik bagi proses pembuatan keputusan selanjutnya.

Selanjutnya itu ada juga lingkungan yang ikut mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Lingkungan memberikan kontribusi yang cukup penting dalam proses ini karena situasi lingkungan pada saat itu menggambarkan apa yang terjadi dan apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya lingkungan ini maka keputusan yang diambil nantinya diharapkan akan tepat dan sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh lingkungan tersebut.

Gambar 1.2

Aplikasi Bagan Proses Pengambilan Kebijakan David Easton
 Enviroment

rakyat oposisi Suriah
 HAM



Enviroment

Proses pembuatan keputusan menjadi hal yang patut dicermati, mengingat dari titik inilah bisa dilihat apakah proses pembuatan keputusan meyangkut kepentingan regional, nasional, atau bahkan kepentingan sub-nasional semata. Perilaku dalam proses pembuatan keputusan dapat dianalisa untuk menemukan aktor mana saja yang memegang peranan penting dalam Uni Eropa dan yang memiliki pengaruh dominan dalam menentukan setiap langkah arah kebijakan yang dikeluarkan. Dengan melihat penjelasan mengenai kemunculan aktor yang memiliki peran dalam sebuah sistem politik, dalam Uni Eropa terdapat tiga aktor utama dalam pembuatan keputusan, yaitu Komisi Eropa (*The European Commission*), Parlemen Eropa (*The European Parliament*), dan Dewan Uni Eropa (*The Council of the European Union*).

Berdasarkan aplikasi teori diatas jelas ditunjukkan adanya tuntutan (*demands*) dan dukungan (*supports*) bagi Uni Eropa dalam sikapnya melakukan pelarangan kalangan dekat Presiden Suriah Bashar Al-Assad untuk ke Eropa. Beberapa tuntutan jelas disebutkan berasal dari rakyat oposisi Suriah, Hak Asasi Manusia, dan berbagai organisasi internasional lainnya, seperti PBB dan Liga Arab. Sedangkan dukungan bagi Uni Eropa untuk terlibat dalam konflik yang terjadi di Suriah berasal dari masing-masing anggota Uni Eropa dan visi pendirian Uni Eropa. Sedangkan beberapa hal yang menjadi keputusan atau kebijakan yang dilakukan Uni Eropa bagi pemerintahan Bashar Al-Assad di Suriah juga disebutkan secara jelas.

Selain beberapa hal yang telah disebutkan sebelumnya sebagai faktor pendukung dari kebijakan Uni Eropa dalam penanganan konflik kekerasan di Suriah. Dukungan terhadap masalah ini dikarenakan rezim Bashar sudah membiarkan ribuan korban meninggal dalam konflik ini, hal ini dianggap sangat melanggar hak asasi manusia (HAM) yang juga menjadi salah satu unsur dari kebijakan eksternal HAM Uni Eropa (UE) sejak lama. Pedoman hak-hak asasi manusia Uni Eropa tentang pembela hak asasi manusia bertujuan memberikan saran praktis untuk meningkatkan tindakan UE terkait dengan masalah hak asasi manusia. Pedoman ini digunakan dalam hubungan dengan negara-negara ketiga disemua tingkat serta dalam forum HAM multilateral, untuk mendukung dan memperkuat upaya-upaya yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh UE untuk meningkatkan dan mendorong penghormatan terhadap hak untuk membela HAM. Pedoman ini juga mengatur tentang intervensi UE terhadap para pembela HAM yang menghadapi resiko dan mengusulkan cara-cara praktis untuk mendukung dan membantu para pembela HAM.

Elemen penting dari pedoman ini adalah dukungan dari masing-masing negara anggota Uni Eropa untuk mematuhi kebijakan yang telah dibuat oleh UE, walaupun Inggris tidak bisa sepenuhnya mematuhi kebijakan untuk melarang Asma Al-Assad untuk tidak mengunjungi negara Inggris karena kewarganegaraan Asma masih warga negara Inggris, tetapi selebihnya mendukung keputusan tersebut. Pedoman ini membantu visi dan misi UE dalam

pendekatan visi dan misi UE terhadap para pembela HAM. Pedoman ini juga memberikan kontribusi dalam menjalankan kebijakan HAM Uni Eropa secara umum. Oleh sebab itu pedoman ini menjadi salah satu faktor yang mendukung Uni Eropa dalam mengambil keputusan untuk melakukan pelarangan kalangan dekat Presiden Bashar Al-Assad untuk bepergian ke Eropa.

D. Hipotesis

Uni Eropa memberikan pelarangan kepada kalangan dekat Presiden Suriah Bashar Al-Assad untuk berepergian ke Eropa, karena :

1. Uni Eropa menganggap bahwa Bashar dan kerabatnya tidak berlaku sebagai kepala pemerintahan yang baik, serta melakukan banyak pelanggaran HAM di Suriah.
2. Tuntutan dari Uni Eropa agar rezim Bashar segera menghentikan konflik di negara tersebut.

E. Tujuan

Tujuan dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Menggambarkan sikap Uni Eropa terkait dengan konflik Suriah
2. Mendeskripsikan sikap Uni Eropa dalam pelarangan bepergian terhadap kalangan dekat dan keluarga Presiden Bashar al-Assad.

3. Sebagai syarat untuk memenuhi gelar keserjanaan S-1 pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan kajian skripsi ini secara umum adalah mencakup sikap Uni Eropa dalam pelarangan bepergian terhadap kalangan dekat dan keluarga Presiden Suriah Bashar al-Assad antara tahun 2011 dan 2012. Jangkauan tahun tersebut didasarkan pada statemen-statemen dan putusan-putusan Uni Eropa yang dikeluarkan pada periode tersebut.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Bahan yang dijadikan sumber adalah data-data laporan dari berbagai media cetak, buku, maupun majalah-majalah ilmiah yang membahas tentang topik di atas.

H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini direncanakan akan terdiri dari lima bab. Dimana bab pertama akan berisikan pengantar atau pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, tehnik pengumpulan data, dan sistematika penulisan

Bab kedua akan berisi menjelaskan tentang Uni Eropa, yang berisi tentang penjelasan proses terbentuknya Uni Eropa, Kebijakan Uni Eropa, dan juga sikap bersama Uni Eropa dalam menghadapi masalah internasional.

Bab ketiga akan menjelaskan tentang Negara Suriah, yang berisi tentang mulai dari keadaan geografis, perilaku pemerintahan presiden yang menimbulkan kebijakan Uni Eropa, dan profil Asma Assad.

Bab keempat akan membahas tentang alasan dari sikap Uni Eropa terhadap pelarangan kalangan dekat Presiden Bashar Al-Assad untuk bepergian ke Eropa yang berisi tentang keadaan Suriah saat rezim Bashar berlangsung, dan sikap Uni Eropa atas konflik Suriah.

Bab kelima berupa penutup yang akan membahas kesimpulan dan semua pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini juga akan menandai berakhirnya karya tulis ini.